JKSG
towards better governance

PUSTAKA PELAJAR

DR. ZULY QODIR
DR. ACHMAD NURMANDI
DR. M. NURUL YAMIN

IJTIHAD POLITIK MUHAMMADIYAH:
POLITIK SEBAGAI AMAL USAHA

Ijtihad Politik Muhammadiyah:
Politik sebagai Amal Usaha

Editor: Dr. Zuly Qodir, Dr. Achmad Nurmandi, Dr. M. Nurul Yamin

•

Penyelaras Kata: Ratih Indriastuti
Desain Cover: Haitamy el-Jaid
Penata Aksara: Dwi Agus M.
Pracetak: si Jock
Cetakan I: November 2015

•

Penerbit
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542; Fax (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

Bekerja sama dengan
Jusuf Kalla School of Government
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan Bantul

ISBN: 978-602-229-538-9

Muhammadiyah dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua

ZULY QODIR, ACHMAD NURMANDI DAN M. NURUL YAMIN

MUHAMMADIYAH telah memasuki abad kedua. Tantangan dakwah abad ini tentu tak kalah rumit jika dibandingkan abad pertama. Pasalnya, Muhammadiyah tidak lagi berdiri sebagai ormas modern berbasis sosial kemasyarakatan di Indonesia, tetapi kini berhadapan dengan berbagai persoalan serius nasional maupun internasional. Persoalan nasional maupun internasional itu merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk semakin berkiprah untuk umat secara global. Muham-

Ormas Islam di tanah Air, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, sebagai kekuatan masyarakat madani, telah lama bergelut dengan usaha-usaha besar di bidang pemberdayaan masyarakat. Ormas-ormas tersebut memiliki modal sosial yang besar untuk melakukan usaha pemberdayaan masyarakat. Paling sedikit dapat ditemukan empat unsur pendukung utama dari Ormas Islam di Indonesia:

Pertama, basis nilai yang jelas dan mampu diaplikasikan sebagai daya dorong gerak yang potensial.

Kedua, adanya kepercayaan masyarakat. Ormas Islam masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, berbeda dengan partai politik yang semakin kurang dipercaya masyarakat.

Ketiga, rentang organisasi yang luas dan merata di seluruh tanah air. Karena rentang organisasi yang luas seperti itu maka Ormas Islam dapat menutup salah satu kelemahan masyarakat kita yaitu lemahnya jaringan antar-kelompok masyarakat.

Keempat, sumber daya manusia yang cukup. Dengan sedikit sentuhan pendidikan maupun pelatihan, sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi pendamping masyarakat yang handal.

Barangkali yang diperlukan ke depan adalah bagaimana usaha-usaha besar tersebut lebih diarahkan pada membangun salah satu prasyarat bagi tumbuhnya Masyarakat Madani dalam *nifo* nasional, yaitu integrasi nasional dan kesejahteraan sosial.

Lepas dari itu semua, persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak bekerja untuk membangun Masyarakat Madani, bukan dapat atau tidak dapat. *Wallahualam*.•

13. Politik Elektoral Muhammadiyah di Aras Lokal

(Di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Maros)

ACHMAD NURMANDI, ANDI LUHUR PRIANTO DAN DAVID EFENDI

Pendahuluan

MUHAMMADIYAH sebagai organisasi masyarakat sipil didirikan tiga puluh tiga tahun sebelum Indonesia merdeka (atau dengan kata lain berdirinya 'negara bangsa' Indonesia), yaitu pada 9 Zulhijjah 1330 Hijriyah atau bertepatan dengan 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada awalnya organisasi ini didirikan secara khusus untuk memberikan pelayanan agama kepada

umat Islam di sekitarnya yang masih terkurung dalam budaya sinkretik (Majelis Litbat Muh, 2010) dengan menggunakan metode pelayanan pendidikan dan kesehatan. Anggaran Dasar Muhammadiyah disahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada 22 Agustus 1914 No. 81.

Pada awal berdirinya —sesuai dengan situasi penjajahan— maka pola hubungan antara Muhammadiyah dengan negara penjajah, lebih banyak bersifat komplementatif. Artinya, Muhammadiyah didirikan untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial keagamaan bagi umat Islam, terutama di wilayah Yogyakarta. Peran itu menonjol dijalankan sampai awal menjelang kemerdekaan. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah berdiri tiga puluh tiga tahun, maka peran kenegaraan Muhammadiyah semakin menonjol, dengan menempatkan wakilnya di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum PP Muhammadiyah). Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perdebatan tujuh kata dalam konstitusi dengan diktum "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan perubahannya menjadi Ketuhanan yang Masa Esa. Dengan peran ini dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi penting atau bidan yang mendirikan negara atau arsitek Pancasila (Harun, 1986). Dengan keterlibatan sejarah pendirian negara-bangsa, maka peran Muhammadiyah setelah kemerdekaan tidak lepas dari adanya rasa memiliki negara bangsa Indonesia (nasionalisme). Dalam berbagai kesempatan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif menyatakan bahwa jika Indonesia ambruk, maka Muhammadiyah pun akan ambruk (2013) dan dikatakannya juga dalam sebuah pengantar buku,

"Muhammadiyah yang tidak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia, bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya" (Maarif, 2010). Pola hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah mengambil berbagai bentuk sesuai dengan sejarahnya, seperti politik akomodatif, gerakan sosial dan gerakan oposisi (Majelis Litbang Muh, 2010).

Pada orde reformasi atau transisi demokrasi pada saat ini, menarik untuk mengkaji peran Muhammadiyah sebagai bagian pendiri republik dan bagaimana pola hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah pada masa depan. Transisi demokrasi Indonesia menuju tahapan konsolidasi melahirkan anomali-anomali tertentu, seperti situasi politik tidak menentu (*chaos*), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojok atas perannya mendukung rezim masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk (Nugroho, 2001). Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama antara partai politik, elite, masyarakat sipil dan warga negara secara padu memfasilitasi demokratisasi politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24). Konsolidasi demokrasi yang berjalan tanpa ujung memancing sikap dari berbagai elite Muhammadiyah seperti secara tidak langsung terlibat dalam politik pemilihan (*electoral politics*) di tingkat lokal.

Pada 2013, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan keputusan No. 41/KEP/I.O/B/2013 tentang aktivitas politik pimpinan Muhammadiyah. Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon

Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota. dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, maka harus berhenti dari jabatannya, tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Pimpinan Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya. Keluarnya peraturan ini tidak lepas dari dinamika politik nasional pascareformasi yang membuka liberalisasi politik.

Pada 2010, secara terang-terangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman memobilisasi dukungan politik bagi pasangan Wakil Bupati Sri Purnomo dengan Yuni Satia yang diusung partai gabungan PAN, PDIP, dan Gerindra berhasil meraih suara terbanyak 174.571 suara atau 35,18 persen. Menurutnya, antara basis PDI-P dan Muhammadiyah masih ada pengikut loyal yang tak perlu diimingi uang. Jadi, uang hanya diberikan sebagai imbalan kerja semi-formal bagi kader partai yang bekerja pada malam itu, dalam kerangka target pemenangan satu putaran (Mahadi, 2011).

Di Kabupaten Maros, pada Pemilukada 2010 sikap PDM Kab Maros juga secara tersirat memberikan himbuan untuk memperjuangkan dan memilih kandidat yang berlatar belakang

Muhammadiyah. Meski tidak dilakukan secara tersurat (SK) tetapi konsolidasi organisasi terus dilakukan. Mengingat jumlah suara koalisi PAN dan PBB berdasarkan Pemilu Legislatif 2009 yang hanya sebesar 22.145 dari total jumlah pemilih 171.263 dengan 6 pasangan kandidat. Setelah melalui kompetisi yang sengit, akhirnya pasangan M.M. Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 66.138 suara (38,62%).

Khususnya kebijakan di level kelembagaan persyarikatan Muhammadiyah di DIY sangat menarik untuk ditengok yaitu persoalan keterlibatan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta dan Sleman serta terhadap pencalonan anggota DPD RI dari DIY sejak 2004 silam. Seorang peneliti memberikan komentar demikian:

> *"Muhammadiyah have issued some unusual policies (i) to formally support candidate sin Local mayoral elections (succeed in Sleman but failed in Yogyakarta city); and (ii) to mobilise its members and affiliates to vote candidate for a seat in Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representative Council representing the Yogyakarta province. Surprisingly, the policy has been welcomed by grass-root Muhammadiyah especially the youths. The formal supports for such candidates in the election are likely to give the new cause and energy for social-religious and political activities beyond their routine jobs in the organisation."* (Wardana, 2014).

Tanggapan dan respons elite, kader, dan warga/anggota Muhammadiyah sangat beragam dan tidak monolitik sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak tepat atau ano-

mali dalam berpolitik. Bagaimana proses pelembagaan politik di ormas terbesar ini dengan melihat derajat fragmentasi elite-warga dan terutama perilaku dalam merespons aktivitas politik kepemiluan. Dari berbagai fakta ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana perilaku elektoral "elite" dan 'warga' Muhammadiyah di aras lokal di era liberalisasi politik?

Kerangka Teori

Perilaku Pilihan Politik (Electoral Politics)

Putnam (2001) menjelaskan elite dengan mengajukan pertanyaan 'siapa yang memerintah?' dan ini kemudian memberikan kesempatan dirinya untuk mendefinisikan siapa lapisan kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan tersebut. Putnam fokus pada penggunaan posisi, reputasi, dan analisis keputusan untuk menilai seseorang dapat dikategorikan sebagai elite. Weber juga menempatkan elite yang beragam dalam masyarakat bukan hanya kelas berkuasa dan yang mempunyai kekuasaan. Dua definisi ini apabila digunakan untuk membaca elite Muhammadiyah cukup membantu karena di Muhammadiyah elite sangat otonom dan beragam bentuknya mulai di struktural, kultural, dan elite yang 'menguasai' amal usaha. Sangat populer akhir-akhir ini dengan istilah 'raja kecil' untuk menyebut mereka yang memegang otoritas di AUM.

Kajian perilaku elit Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah maupun politik secara umum dikaji sebagai upaya untuk memotret sisi menarik hubungan lembaga keagamaan atau *civil society* dengan politik (Efendi 2008; Jurdi 2010). Penelitian Warner (2000) tentang peran gereja Katholik di Eropa

lembaga keagamaan berusaha mencapai target pasar dan menjaga ideologinya. Lembaga keagamaan seperti perusahaan dan berusaha menjaga kepentingannya untuk memasuki dunia politik. Organisasi masyarakat Muslim memainkan peran sosial, politik dan keagamaan untuk menjaga eksistensi organisasinya di Indonesia *organizational survival* (Alfian, 1989; Anderson, 1975). Studi di negara lain menunjukkan bahwa keanggotaan dalam organisasi keagamanan mendorong partisipasi aktif dalam politik dan menggunakan "clues" dan "codes" dalam kampanye (Calfano & Djupe, 2009, hlm. 329; McVeigh & Sikkink, 2001; Wald, 1992; Wald et al., 1988). Di Turki, organisasi keagamaan mengisi ruang-ruang pelayanan publik yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat miskin dengan wakaf dan zakat (Gulalp, 2001; Onis, 1997). Sementara itu di Maroko, organisasi keagamaan Islam meningkatkan pelayanan pada masyarakat di tengah krisis ekonomi pada 1990-an (Lust-Okar, 2004, hlm. 166). Mirip dengan Maroko, di Mesir, Kelompok Ichwanul Muslimin memperoleh suara yang signifikan dalam pemilihan umum karena gerakan sosial dan bantuan ekonomi pada kaum miskin (Sullivan, 1994; Tal, 2005).

Kajian literatur tentang perilaku memilih (*voting behaviour*) pada awalnya berasal dari tradisi pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori pilihan rasional pertama dikemukakan oleh Anthony Down (1959) yang mengajukan asumsi pokok bahwa partai politik dan pemilih mempunyai alasan rasional untuk beraktivitas politik untuk memperoleh benefit dari perilakunya. Teori rasional mengembangkan perilaku partai politik dalam demokrasi kompetitif dibedakan menjadi: (1) *vote seeking*; (2) *office*

seeking; dan (3) *policy seeking* (Strom,1990). *Vote seeking party* adalah kumpulan orang-orang yang memaksimalkan dukungan elektoralnya untuk mengawasi pemerintah. *Office seeking party* adalah partai politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah guna kepentingan partai yang bersangkutan. Sementara *policy seeking party* adalah partai politik yang berusaha memaksimalkan fungsinya untuk membentuk kebijakan. Jenis terakhir ini dipengaruhi oleh literatur tentang teori-teori koalisi partai politik (Lijphart, 1984, Axelrod, 1970, Browne, 1973).

Teori pilihan rasional dikritik oleh tradisi yang muncul berikutnya yang dikenal dengan "neoinstitutionalism" (pendekatan kelembagaan) yang dikemukakan oleh March dan Olsen (1984) atau yang dikenal dengan *pure theory*. Dalam praktik, asumsi *vote seeking party* dikritik karena tidak berlaku secara empiris pada prinsip "catch-all" yang terjadi di Swedia pada *People Party* (Kirchheimer, 1966) atau kemenangan *Labour Party* di Inggris pada 1983. Sementara itu, asumsi *office seeking party* bahwa partai berusaha berkoalisi untuk berkuasa tidak selalu didukung oleh fakta empiris, karena sering kali koalisi minoritas menguasai pemerintahan di banyak negara, seperti kasus Indonesia. Asumsi ketiga bahwa *policy-seeking party* adalah asumsi yang paling sulit diukur efektivitasnya, karena dalam praktik kebijakan pemerintah sering kali dibuat bukan oleh partai politik tetapi kelompok kepentingan atau aktor-aktor lain atau pihak asing.

Strom (1990) lebih lanjut mengajukan kritik pada tiga pendekatan di atas dengan mengajukan asumsi bahwa perilaku partai politik dianggap statis, aktor-aktor politik dianggap seragam

dan tidak dapat dikekang dan mengabaikan faktor lingkungan. Dia lebih lanjut mengajukan sebuah model karena tidak ada partai politik yang murni masuk ke dalam tiga tipe di atas, dalam model terpadu (*unified model of party behavior*), dengan persamaan sebgaai berikut:

$B = w_1V + w_2O + w_3 P$ (Strom, 1990), di mana:

B = posisi dalam ruang perilaku V = perilaku vote-seeking O = perilaku office seeking P = perilaku policy-seeking W n = koefisien (bobot) dari masing-masing perilaku

W 1 + w 2 + w 3 = 1
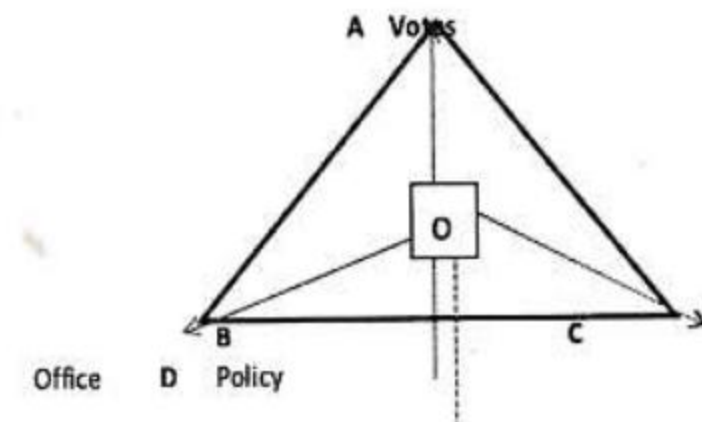
Gb. 1. Ruang Kelayakan Perilaku Partai Politik

Sumber: Strom Kaare, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties", *American Journal of Politicai Science*, Vol. 34, Issue 2, 1990.

Sebagai organisasi, partai politik atau NGO, cenderung melakukan keseimbangan dengan menonjolkan perilaku enter-

preneur. Elite partai berusaha menjadi pimpinan partai politik untuk memperoleh benefit dari aktivitas politiknya (Storm, 1990). Partai politik juga berusaha membatasi pimpinannya dengan membangun organisasi untuk membantunya dalam menjaga informasi, memobilisasi pemilih dan melaksanakan kebijakan (Storm, 1990).

Model yang dikemukakan oleh Strom di atas memfokuskan pada kajian perilaku partai politik, namun belum melihat bagaimana perilaku organisasi non partai dalam pemilihan umum. Abrams, dkk (2010) mengkritik bahwa teori pilihan rasional atau model Strom di atas gagal menjelaskan perilaku organisasi non partai dalam pemilihan umum. Mereka mengemukakan model baru yang dinamakan dengan *informal social network* (ISN) dengan asumsi bahwa seseorang memilih secara rasional karena dorongan dari jaringan informal, pertemanan, atau organisasi, sehingga mendapat pengakuan sosial (*social approval*) atau sebaliknya. Asumsi pokok dari model ini adalah bahwa kelompok adalah pemilih yang penting (*probabilistic pivotal voter*) dibandingkan dengan individu (*individual probalistic pivotal voter*). Dalam mobilisasi kelompok, anggota kelompok diberikan insentif untuk memilih dalam tujuan kepentingan kelompok, atau dalam model etis anggota kelompok melakukan pilihan dengan asumsi etis. Dalam pandangan ISN, NGO atau Muhammadiyah secara politik aktif memobilisasi anggota untuk memilih calon tertentu disebabkan pengakuan sosial dan tidak adanya pengakuan sosial (*social approval: A and social disapproval*: D). Perilaku untuk memilih anggota NGO dipengaruhi oleh besar dan pentingnya jejaring informal dan keanggotaan yang ber-

ada diatas hubungan kekeluargaan (Abram, dkk. 2010). Dalam penelitiannya di USA, Abram, dan kawan-kawan (2010) menemukan bahwa keanggotaan dalam organisasi, tingkat keagamaan, kehadiran dalam aktivitas gereja memengaruhi perilaku memilih. Sebaliknya partai politik pun memanfaatkan kelompok-kelompok keagamaan ini sebagai media kampanye yang efektif untuk meningkatkan jumlah suara.

Penelitian Wibowo (2008) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa perilaku elektoral warga Muhammadiyah di kalangan elite menggunakan simbol-simbol organisasi untuk memengaruhi massa. Simbol di sini berupa kehadiran tokoh Muhammadiyah dalam sosialisasi di tingkat desa, simbol verbal berupa bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam lingkungan Muhammadiyah dan juga interaksi antara elite Muhammadiyah dengan jaringan yang selama ini telah tertata. Ada beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Wibowo (2008) dalam wawancara dengan narasumber, misalnya keberanian seorang dokter dan pejabat struktural di Rumah Sakit Aisyiyah yang dengan terang-terangan menolak pasangan yang ditetapkan organisasi dan lebih memilih pasangan partainya, yaitu PKS dan terjadi ketegangan karena dukungannya tidak hanya berupa suara, tetapi juga menyuplai sebagian dana untuk pasangan lain dan juga terjadi pada beberapa orang dosen di sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Bagaimana lembaga keagamaan memengaruhi perilaku elektoral? Mengikuti analisis Busse (2012), perilaku elektoral lembaga keagamaan lokal dibagi empat yaitu (1) analisis pemilihan dan perilaku politik (*voting and political behavior*); (2) ke-

kuasaan lembaga keagamaan (*the power of religious bodiesas institutional players*); (3) lobi dan partner koalisi (*lobbyists and coalition partners*); (4) peran lembaga dalam kebijakan daerah (*religion's role in the origins of institutions and long-term political outcomes*); (5) dampak terhadap kebijakan (*the impact of religion on attitudes toward and policies of socialwelfare*); dan (6) pengaruh terhadap pemerintah dan keberlanjutannya (*its broad influence on regime type and durability*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif yang menginvestigasi dinamika politik lokal dan perilaku politik elite lokal Muhammadiyah di dua daerah yaitu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pilihan pada dua kabupaten ini, disebabkan dukungan formal dari pengurus daerah, secara emplisit bertentangan dengan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang secara tegas melarang secara organisasi mendukung calon kepala daerah tertentu. Sumber utama informasi penelitian ini adalah dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah maupun pihak yang berseberangan. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan dari tim sukses juga menjadi bahan untuk diolah, dikategorikan, dan dikomparasikan antara kasus di Sleman dengan apa yang terjadi di Maros.

Adapun data yang digunakan adalah data-data yang bersumber dari data sekunder atau penelitian sebelumnya, dan data primer yang bersumber dari wawancara terstruktur dengan elite Muhammadiyah di kedua kabupaten tersebut serta pihak-pihak

yang mempunyai keterkaitan dengan pilihan politik elitenya. Kedua contoh kabupaten ini mengilustrasikan 'keberhasilan' elite mengusung kandidatnya dengan segala pertanyaan yang tersisa — apakah keberhasilan ini merupakan desain untuk keterlibatan politik secara aktif, baik dalam masa pemilu maupun pascapemilu atau lebih digerakkan oleh sentimen atau politik aliran semata dan atau "gengsi politik" di level daerah? Ini merupakan salah satu subpertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini.

Kepercayaan dan Perilaku Politik

Perilaku elite kerap kali tidak terkonsolidasikan sebagai perilaku yang seiring dan sejalan dengan umat atau jamaahnya. Situasi keterpisahan imajinasi elite dengan jamaah Muhammadiyah ini dipotret oleh David Efendi (2014) dalam bukunya yang berjudul 'Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam pemilu presiden 2009 dan 2014'. Hal ini sangat menonjol di saat panggung politik nasional. Ada banyak alasan yang dapat dijadikan pijakan misalnya ini terkait dengan jarak politik (*political distance*) antara jamaah dengan elite ormas di tingkat pusat. Selain itu, sebagian warga Muhammadiyah tidak menginginkan elitenya terjun secara terang-terangan dalam politik praktis, tetapi bisa memainkan apa yang disebut *high politics* atau politik nilai.

Agama dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber kesetiaan komunal dan berbagi identitas dan pemahaman, tetapi juga sumber ideologi yang penting *(powerful ideology)*, sebagai seperangkat prinsip dan klaim tentang bagaimana dunia seharusnya menjalankan fungsinya (Busse, 2012). Sebagai lembaga keagamaan Muhammadiyah menjadi panduan berperilaku bagi

anggotanya, karena memiliki ideologi yang jelas, terutama dalam perilaku elektoral. Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo yang didukung PDIP dan PAN menang dalam Pilkada langsung tahun 2005 itu dengan perolehan suara sebesar 39,6 persen sedangkan pesaing terdekatnya pasangan Hafidh Asrom dan Kusbaryanto memperoleh 33,9 persen, yang didukung PKB dan PKS. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman merasa perlu membuat fatwa khusus untuk mendukung calon ini yang memiliki latar belakang Muhammadiyah. Pada 2009, Sri Purnomo menjadi "real bupati, setelah Bupati Sleman Ibnu Subiyanto ditahan di Rumah Tahanan Cebongan, Kabupaten Sleman karena dugaan kasus korupsi buku ajar Sleman sebesar Rp 12,1 miliar itu berdasarkan surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diketuai oleh Sri Andini tertanggal 16 Juni 2009. Pengurus PDM Sleman merasa perlu membuat fatwa khusus untuk mendukung calon ini yang memiliki latar belakang Muhammadiyah.

Pengurus PDM Kabupaten Sleman didasarkan pada perilaku elektoral pada pemilukada pada 2010, yang secara formal mendukung pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu (dicalonkan PDIP, PAN dan Gerindra). Aktivisme politik juga dilakukan oleh PDM Sleman dalam pemberian dukungan 'formal-kelembagaan' kepada calon anggota DPD RI sejak 2004, 2009, dan 2014. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Maros, yaitu PDM Kabupaten Maros pada Pemilukada 2010 secara formal-kelembagaan memberikan dukungan politik kepada pasangan bupati dan wakil bupati H.M. Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang yang dicalonkan oleh PAN dan PBB serta melakukan praktik politik akomodasi atau apa yang

kita kenal sebagai 'politik patronase' (Aspinal, 2015) kepada sejumlah kader Muhammadiyah pada jabatan di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros.

Pada periode kedua yaitu 2010-2015, Sri Purnomo mencalonkan kembali dengan didukung Muhammadiyah untuk menjadi bupati dan menggandeng calon dari PDIP, Yuni Setia Rahayu yang didukung oleh PDIP, PAN dan Gerindra. Pasangan ini memperoleh suara sebesar 174.571 suara (35,2 persen) mengalahkan tiga pasangan lainnya yakni pasangan Bugiakso-Kabul mendapat 164.672 suara (21,1 persen), Mimbar-Wening 14.860 suara (2,9 persen), Sukamto-Suhardono 106.838 suara (21,5 persen). Keberhasilan ini membuat pengurus dan kader Muhammadiyah sangat percaya diri bahwa Muhammadiyah dapat memberikan kader terbaiknya untuk memimpin daerah. Hanya di Sleman, di kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta tidak ada pengurus harian PDM yang berhasil menduduki jabatan politik tertinggi di daerah.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Pendukung dan Suara Calon Bupati

	Pileg 2004	Pileg 2009	Pilkadal 2005 (PDIP dan PAN)	Pilkadal 2010 PDIP, PAN, GERINDRA)	Selisih	
	(A)	(B)	(C)	(D)	C-A	D-B
PAN	**104192**	**52837**	**104192**	**52837**		
PDIP	104288	96297	104288	96297		
GERINDRA		20146		20146		
Lain			-13016	26184		
Jumlah	208480	169280	195464	174571	-13016	26184

Uji beda terbukti: Sig (2 tailed) 0.746; Sumber: diolah dari data KPUD Kab. Sleman.

Dari uji beda antara perolehan suara partai pendukung dalam pemilihan dan suara perolehan calon kepala daerah pada dua kali pilkada, yaitu pada 2005 dan pilkada 2010 terdapat perbedaan yang signifikan setelah diuji secara statistik. Perolehan suara partai politik pada 2004, PDIP dan PAN sebanyak 208.480 suara, namun perolehan suara calon kepala daerah Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo, pada 2005 sebanyak 174.571 suara atau turun 13.016 suara. Pada periode berikut, yaitu pemilu tahun 2009, perolehan suara partai pengusung yaitu PDIP, PAN dan Gerindra sebanyak 169.280 suara, namun perolehan calon yang didukung: Sri Purnomo menjadi calon bupati dan Yuni Setia Rahayu menjadi calon wakil bupati sebanyak 174.571 suara. Jika diasumsikan bahwa seluruh pemilih PAN adalah warga Muhammadiyah, maka porsi dukungan elektoral warga Muhammadiyah pada Sri Purnomo pada posisi tahun 2005 sebagai wakil bupati sebesar 53,3%, dan pada pilkadal tahun 2010 sebagai calon bupati sebesar 30.3%.

Keterpilihan Sri Purnomo pada periode kedua, lebih banyak didukung oleh jaringan Muhammadiyah yang secara formal mendukung penuh, dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranting. Pola memilih ini sebagaimana juga ditemukan pada perilaku pemilih dalam pilkadal lainnya yang lebih berdasarkan pada profil calon dan jejaring dengan akar rumput, dan bukan kekuatan ekonomi atau finansial atau program kerja (Buehler, M., 2007), (Choi, N. 2005). Adalah menarik untuk membandingkan perolehan suara Sri Purnomo dan suara Afnan Hadikusumo yang juga secara formal menjadi wakil Muhammadiyah untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan Wila-

yah Muhammadiyah (PWM) DIY menyeleksi bakal calon anggota DPD untuk didorong menjadi anggota DPD jauh sebelum Pemilu 2014 dan terseleksi Afnan Hadikusumo yang merupakan anggota DPD periode tahun 2009-2014. Setelah 'tim transisi' atau dikenal "tim kecil" yang digerakkan oleh LHKP PWM bekerja atas dasar SK PWM No.02/KEP/II.0/D/2013 mengenai panitia penjaringan calon DPD wakil Muhammadiyah, kemudian pimpinan wilayah membentuk tim sukses resmi yang didaftarkan ke KPU dengan menunjuk Husni Amriyanto Putera (Dosen UMY) sebagai ketua dan dilengkapi perwakilan pengurus harian, ortom, dan pengurus PDM (SK PWM DIY No. 36/KEP/II.0/D/2013) Hasil kerja tim ini kembali menempatkan M. Afnan sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 dengan dukungan suara sebanyak 144.820 yang sebagian besar disumbang dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Angka ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2009 yang hanya memperoleh 106/117 ribu suara.
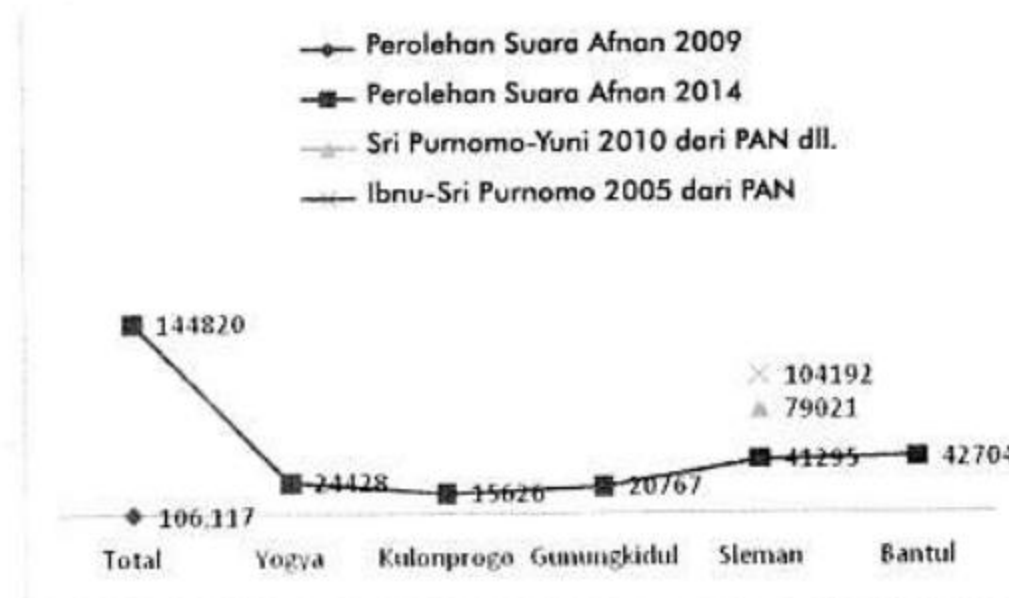
Gb.1. Perolehan Suara Wakil Muhammadiyah di Pilkada dan DPD

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah dukungan warga Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pada wakilnya yang berbeda posisi tidak sama. Artinya walaupun calon tersebut dicalonkan secara formal oleh Muhammadiyah untuk bertarung dalam pilkada dan anggota DPD, pilihan politik warga Muhammadiyah dapat berubah dan dinamis. Kedua, sebagaimana hasil penelitian terdahulu, perilaku elektoral warga Muhammadiyah cenderung otonom. Dari komposisi organisasi dan sistem pemilihan pimpinan, Muhamamdiyah mempunyai derajat otonomi yang tinggi. Dalam konteks pemilu nasional, elite Muhammadiyah terfragmentasi menjadi beragam ekspresi baik yang fundamentalis politik, netral aktif, netral kritis, dan 'apolitik' (Efendi, 2014).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman memfasilitasi agenda Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berupa Turba atau Silaturrahim LHKP PWM DIY ke Sleman, pada Jumat 18 November 2011 pukul 18.00 WIB di Rumah Dinas Bupati Sleman. Agenda yang dibahas antara lain: (1) sosialisasi hasil Rakerwil; (2) identifikasi sinergi Muhammadiyah dan Pemda Sleman; (3) inisiasi forum diskusi kebijakan. Acara ini dipimpin Nur Cahyoprobo (caleg PAN) sebagai Ketua LHKP PDM Sleman yang membidangi urusan politik.

Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY menyambut baik inisiasi LHKP PDM Sleman untuk hidupkan Forum Kajian & Advokasi Kebijakan. Hal itu sesuai dengan program dan hasil rakerwil LHKP PWM DIY yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Harapan

ke depan adalah adanya prioritas oleh Pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendukung gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam yang mempunyai banyak program sosial kemasyarakatan. Forum tersebut juga diisi dengan dialog interaktif dengan bapak Bupati Sleman Drs.H. Sri Purnomo, M.Si yang juga memaparkan peluang untuk kiprah advokasi di masyarakat.

Otoritas Muhammadiyah sebagai Pemain Politik

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik sama sekali bukan hal baru. Namun demikian, memahami Muhammadiyah sebagai entitas politik *an sich* tentu kurang tepat. Secara kelembagaan bisa jadi tidak memperlihatkan wajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa terlibat dalam politik. Peta dan dinamika politik yang berubah juga menggiring pilihan-pilihan kelembagaan ormas untuk berubah dalam cara menyikapi perkembangan politik. Terbukanya kran politik memungkinkan secara organisatoris terlibat dalam proses elektoral di daerah—sebagai kebutuhan strategis dakwah maupun sebagai 'korban' tarik-menarik kepentingan politik elite tertentu, atau keduanya. Salah satu perubahan 'filosofi' berpolitik Muhammadiyah adalah dari 'menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik' menjadi 'menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik'. Ungkapan sederhana ini mempunyai dampak serius dalam perilaku elektoral pengurus Muhammadiyah di daerah secara nasional.

Dalam politik elektoral, walaupun George Kahin (1970) mengatakan sejak 1970-an Islam telah kehilangan kekuatan po-

litiknya, organisasi keagamaan bernama Muhammadiyah memainkan peran sebagai 'pemain politik' sebagaimana partai politik dalam batas tertentu — komunikasi politik, kandidasi, mobilisasi dukungan, dan pendidikan pemilih. Dalam kasus pilkada Kabupaten Sleman pada 2010, PDM membentuk tim sukses yang diketuai oleh Parwoto, salah satu pimpinan PDM dan mantan politisi Golkar. Tim ini mengoordinir tim sukses tingkat kecamatan dan kelurahan, yang berbasiskan pada PCM dan PRM (Pengurus Cabang Muhammadiyah dan Pengurus Ranting Muhammadiyah). Dana tim kampanye berasal dari calon bupati dan swadaya warga Muhammadiyah di berbagai tingkat.

Sementara pada Pemilukada Kabupaten Maros 2010, meski PDM tidak membentuk tim pemenangan secara formal, tetapi modal jejaring organisasi digerakkan untuk kepentingan kandidat berlatar belakang kader persyarikatan. Konsolidasi organisasi pun terus diintensifkan pada masa-masa menjelang pemilihan dengan melibatkan pengurus unit amal usaha serta jejaring organisasi otonom (ortom). PDM sebenarnya tidak mentransformasikan diri menjadi aktor, tetapi secara diam-diam ingin mengalokasikan nilai dengan cara mengeksploitasi modalitas atau basis legitimasi yang dimiliki elite Muhammadiyah untuk bermain politik.

Sementara itu, dalam kasus pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2014, PWM membentuk tim sukses di tingkat provinsi dan diikuti dengan tim sukses di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang masing-masing melekat pada fungsi PDM, PCM dan PRM. Rapat-rapat pengurus pada masa kampanye membahas agenda pemilihan anggota DPD dan langkah-lang-

kah untuk keberhasilan meraih suara bagi calon, Afnan Hadikusumo. Pengalaman "keberhasilan" menampilkan kader persyarikatan pada kontestasi pemilihan DPD pun dimiliki oleh PWM Sulawesi Selatan pada Pemilu 2014. Setelah mengalami "kegagalan" meng-endorse elite pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilihan DPD Tahun 2004, meski PWM telah merekomendasikan mantan Ketua PWM K.H. Nasruddin Razak sebagai calon resmi, tetapi rivalitas internal tetap terjadi dengan tampilnya Ketua PW Aisyiyah Nurhayati Aziz sebagai kandidat DPD. Eksperimen *low-politics*ini terbukti gagal karena fragmentasi elite dan konsolidasi politik organisasi yang tidak berjalan. Situasi yang hampir serupa terjadi pada pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2009, setidaknya terdapat empat orang kandidat berlatar belakang kader persyarikatan berkompetisi memerebutkan kursi senator. Adalah KH. Iskandar Tompo (Wakil Ketua PWM), Nurhayati Aziz (Ketua PW Aisyiyah), A. M. Iqbal Parewangi (Kader IPM), serta Alamsyah Demma (Kader IRM) bersaing memperebutkan dukungan suara pemilih persyarikatan. Hasil pleno PWM telah memutuskan untuk mengusung KH.Iskandar Tompo sebagai kandidat yang mendapat restu organisasi, tetapi munculnya beberapa kader persyarikatan dalam kandidasi DPD ini membuat modalitas sosial dan politik mengalami fragmentasi yang berujung kegagalan. Situasi yang sangat berbeda terjadi ketika pemilihan DPD pada Pemilu 2014, A. M. Iqbal Parewangi, kandidat yang berlatar belakang pendidikan Muallimin Muhammadiyah ini, berhasil meraih rekomendasi PWM untuk menjadi representasi persyarikatan dalam pemilihan DPD ini. Kompetisi internal kader persyarikatan kali ini tidak terjadi, sebagaimana

rivalitas kader dalam pemilihan DPD pada Pemilu 2004 dan 2009. Eksperimen politik formal cukup berhasil mengantarkan A.M. Iqbal Parewangi meraih kursi senator DPD mewakili provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat praktik *low-politics* yang diperankan oleh PWM Sulawesi Selatan dalam setiap kompetisi pemilihan senator DPD, maka pergumulan Muhammadiyah di gelanggang politik sungguh unik. Dikatakan unik karena meskipun corak hubungan Muhammadiyah dan politik bersifat fluktuatif, namun Muhammadiyah dalam sejarahnya selalu membangun komunikasi yang intensif dengan kekuatan-kekuatan politik. Kedekatan itu untuk mempermudah saluran-saluran (alokasi nilai-nilai) di kekuatan politik tersebut.

Agama dan Politik Alokatif

> *In a more moderate articulation of this thesis, Protestantism facilitates democracy: the doctrine encourages individual conscience, with the Bible as key authority rather than priests or religious authorities, and its tenets "tend towards separation and independence from ancient church structures and traditions as well as political authorities"* (Woodberry & Shah, 2004 hlm. 48).

Organisasi keagamaan sering kali hadir dalam kancah politik sebagai pembawa pesan, nilai dan formula kemaslahatan bersama. Meskipun demikian, perilaku organisasi keagamaan sering pula menampilkan perilaku politik dengan wajah sektarian, berpihak serta terjebak pada *low-politics*. Secara normatif, konstruksi ideal relasi Muhammadiyah dan politik sudah cukup terang. Khittah 1971 hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang masih berlaku dan menjadi pegangan kuat war-

ga Muhammadiyah dalam berpolitik hingga saat ini. Khittah 1971 menandaskan bahwa "Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apa pun". Diktum itu sangat jelas, Muhammadiyah tidak menghimpitkan diri dan berhimpitan dengan partai politik mana pun. Kalau Muhammadiyah tidak memiliki artikulasi partai politik, pertanyaannya adalah, bagaimana wujud dakwah politik Muhammadiyah untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertanyaan selanjutnya, sudah efektifkah pilihan strategi politik yang dilakukan Muhammadiyah selama ini (Ali, 2010).

Artikulasi dakwah politik Muhammadiyah, yaitu: *high politics* yang diperkenalkan Amien Rais, untuk membedakannya dengan *low politics* sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik (Maarif, UQ/1995) dan *allocative politics*, untuk membedakan dengan *constitusional politics*, model Din Syamsuddin (1990: 163-206). Keduanya menunjukkan idealisme politik Muhammadiyah, yaitu politik adiluhung berpayung amal shalih sebagai terjemahan dari semangat dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan untuk menempati kekuasaan di legislatif ataupun eksekutif sebagaimana dilakukan partai politik.

Secara konsepsional, garis demarkasi antara *high politics* dan *low politics*: bisa dilakukan, yakni dengan mendefinisikan *high politics* sebagai perilaku yang terkait dengan politik moral, aktivitas yang terkait dengan fungsi kontrol atau pengawas ter-

hadap kekuasaan, serta aktivitas bidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; di sisi lain perihal yang menyangkut *low politics* merujuk pada politik praktis atau perilaku nyata yang terkait pengelolaan kekuasaan secara langsung, atau sebagai pemain kekuasaan.

Formulasi politik alokatif atau *high-politcs* ala Muhammadiyah yang selama ini dipegang tersebut ternyata juga diartikulasikan dengan nuansa yang berlainan oleh elite pimpinan Muhammadiyah. Bentuk artikulasi politik alokatif dalam konteks kenegaraan perlu dibaca secara jernih dan objektif. Pembacaan terhadap gerak politik alokatif Muhammadiyah bisa menjadi cermin sekaligus bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mengalokasikan nilai-nilai/moral Islam kepada para pemegang otoritas kekuasaaan. Keberhasilan kader-kader Muhammadiyah menduduki jabatan-jabatan dalam ranah kekuasaan politik dan pemerintahan lokal menjadi arena untuk menerjemahkan semangat dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ruang demokrasi yang menyediakan arena kontestasi bagi seluruh kelompok, dapat menyerap sumber daya persyarikatan untuk terlibat pada urusan-urusan politik formal, menerjemahkan politik konstitusi (Din Syamsuddin, 1990) sebagai aktor-aktor kekuasaan lokal.

Di Kabupaten Maros, dan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan, *euphoria* masa-masa awal demokratisasi dan desentralisasi dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi nilai dan matan keyakinan organisasi massa berbasis Islam, untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Islam dalam politik kekuasaan formal. Ma-

raknya perjuangan Islam formal di Sulawesi Selatan di masa awal desentralisasi melalui Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) mendorong beberapa daerah bereksperimen untuk memproduk Perda berbasis syari'ah. Beberapa Perda Syari'ah yang diproduk di Kabupaten Maros antara lain: (1) Perda No.9/2001 tentang Larangan Peredaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika; (2) Perda No. 16/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah; (3) Perda No. 15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur'an; terakhir, perda No. 17/2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Meskipun pelembagaan syari'at Islam melalui Peraturan daerah syari'at ini bukan wacana *mainstream* pemikiran persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kader-kader persyarikatan di lembaga kekuasaan politik lokal memilih jalan politik akomodasi dan kompromi terhadap tuntutan pelembagaan Islam formal ini. Sebagian elite Muhammadiyah memandang bahwa nilai-nilai persyarikatan bisa diwujudkan melalui pada perjuangan politik formal dalam bentuk formalisasi syari'ah. Sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan *platform* Muhammadiyah yang diimplementasikan ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Salah satunya ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan pada awal 2012 (Tanjung, 2012).

Muhammadiyah dan Rezim Politik

Terdapat dua indikator penting dalam subbahasan ini adalah bagaimana Muhammadiyah menggunakan bupati untuk men-

jaga 'mainstream' keagamaan di daerah sesuai dengan paham organisasi tersebut. Peran Bupati menggunakan kekuasaan untuk mensyi'arkan paham Muhammadiyah kepada masyarakat dan terkait perwakilan jumlah pengurus Muhammadiyah yang menjadi pimpinan di lingkungan pemerintah daerah setempat. "Politik nilai" dalam beragam forum pimpinan sangat menonjol bahwa pilihan politik Muhammadiyah untuk mendukung mempunyai misi untuk dakwah *amar maruf nahi munkar* sebagaimana ini doktrin organisasi yang sangat populer. Hal ini terungkap dalam beberapa rekaman, di antaranya adalah:

> "Kita mendudukkan kader kita di pemerintahan adalah untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah, untuk menjaga paham keagamaan Muhammadiyah. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang strategis bagi Muhammadiyah, dan banyak pihak lain juga berkepentingan dalam kepemimpinan politik Selain itu, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha di kabupaten ini sehingga Muhammadiyah harus menjaganya."[1]

Kabupaten Sleman dikenal dengan kabupaten yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi dengan gesekan antar pemeluk agama yang cenderung intensif. Beragam bentuk kekerasan terus terjadi hingga tahun 2014 ini. Peristiwa perusakan Gereja yang tidak berizin terjadi ketika puluhan orang "tidak dikenal" melakukan perusakan sebuah gereja di Sleman, (KR, 1/6/2014). Massa menganggap gereja Kristen yang ada di wilayah Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, tidak berizin. Hubungan Islam

[1]Wawancara dengan salah seorang pengurus PDM Kabupaten Sleman tanggal 7 Agustus 2014.

dengan kristen kerap kali menunjukkan hubungan yang pasang naik dan pasang surut. Muhammadiyah sebagai organisasi moderat juga sering kesulitan untuk mengambil posisi tengah karena warga Muhammadiyah sendiri sudah menjadi bagian dari kelompok yang mengambil jarak dan 'oposisi' terhadap aktivitas gereja. Di sini sering kali menunjukkan 'posisi sulit' hubungan antara Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan pemerintah daerah yang harus mengayomi beragam komunitas walau pucuk kekuasaan dijabat orang Muhammadiyah.

Salah satu dari kesulitan kebijakan Muhammadiyah adalah ketegasan mengenai keberadaan kelompok Syi'ah sehingga celah ini dimanfaatkan oleh "oknum" Muhammadiyah yang mengarahkan wacana bahwa Syi'ah sesat dan bukan Islam dan tidak ditolerir berada. Bupati Sleman pun akhirnya berada dalam arus yang sama untuk 'menolak' Syi'ah. Sri Purnomo (SP) sebagai pimpinan deklarasi masyarakat pecinta sunah (KR, 16/12/2013) di masjid kampus UGM dinilai mencederai HAM sekaligus diduga melanggar konstitusi oleh beberapa LSM, seperti LBH dan Makaryo. Sejumlah pegiat antikekerasan DIY tersebut konsolidasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk merespons situasi yang berkembang. Dalam pernyataan sikapnya, Makaryo menduga Sri Purnomo melanggar salah satu pasal UUD 45 yaitu "Negara berdasarkan Pancasila memiliki UUD 45 sebagai dasar konstitusi mengatur hak sipil dan politik. Dalam konteks berbangsa dan bernegara Sri Purnomo telah mencederai mandatnya sebagai pejabat publik. Pernyataan sikap tersebut lantas diikuti dengan beberapa tuntutan. Pertama mendesak Presiden hingga Gubernur DIY untuk melakukan teguran

kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Fenomena yang terjadi di Sleman adalah ilustrasi penting bagaimana nilai-nilai agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pengambilan kebijakan dan pengaturan masyarakat. Dalam pandangan kelompok tertentu dalam Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh Sri Purnomo untuk 'memerangi' Syi'ah adalah keputusan yang tepat dan mencerminkan keberpihakan kepada nilai ajaran Islam yang secara langsung juga dapat diartikan telah menjalankan "misi" dakwah Islam Muhammadiyah. Tetapi kelompok lain akan memandang sebaliknya, karena secara kelembagaan Muhammadiyah tidak pernah memutuskan bahwa Syi'ah itu sesat dan bukan Islam. Tafsir keagamaan memang tidak tunggal, begitu juga Muhammadiyah selalu mempunyai banyak wajah dalam merespons isu politik di daerah. Upaya menjaga identitas dan gerak Muhammadiyah tentu semua jamaah Muhammadiyah setuju, tetapi jika dilakukan dengan cara-cara yang diskriminatif dan tidak adil tentu ada juga warga Muhammadiyah juga akan melawan. Mukti Ali (1981) melihat karakteristik ini ada, bahwa tampak dari luar Muhammadiyah itu terkesan "agresif dan fanatik, namun dalam kenyataannya perkembangbiakannya berangsur-angsur dan toleran."

Di Maros, kehidupan sosial budaya masyarakat diwarnai nilai-nilai keagamaan yang cukup kental. Ormas keagamaan yang berbasis Islam, selama ini cukup mewarnai interaksi sosial kemasyarakatan. Secara kultural, nuansa keagamaan di Kabupaten Maros telah terintegrasi dengan kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya serta sosial politik. Kabupaten Maros cukup populer sebagai basis beberapa tarekat mu'tabarah yang

ada di Indonesia. Turikale sebagai Ibu Kota Kabupaten Maros merupakan tempat "bermula" di mana beberapa Tarekat masuk dan dikembangkan. Tarekat Sammaniah atau Tarekat Khalwatiyah Samman mulai masuk dan berkembang di Kampung Pacelle, wilayah Regenschap Turikale. Tarekat Tajul Khalwaty atau yang populer sebagai Tarekat Khalwatiyah Yusuf juga masuk dan berkembang di wilayah Distrik Turikale, yakni di Kampung Labuang. Selain kedua tarekat tersebut, Tariqatul Muhammadiyah (Tekolabbua) dan beberapa tarekat lainnya seperti Tarekat Naqsabandiyah juga menjadi Tarekat yang cukup populer bagi masyarakat Maros.

Secara kultural, jamaah tarekat ini memiliki kedekatan dengan ormas Nahdatul Ulama (NU) sehingga sering menjadi cara untuk mengidentifikasi jumlah pengikut NU di Kabupaten Maros. Ada pendapat bahwa selain warga Muhammadiyah yang ada di pesantren Darul Istiqamah Maccopa, semuanya adalah warga NU. Klaim ini hampir serupa bahwa seluruh warga selain Muhammadiyah adalah warga Nahdiyyin, padahal terdapat organisasi dan tarekat-tarekat keagamaan yang tidak mengaku sebagai warga bintang Sembilan tersebut, misalnya Darul Dakwah wa-Irsyad (DDI), tarekat Naksabandiyah, tarekat Khalwatiah dan lain sebagainya.

Persyarikatan Muhammadiyah sendiri yang telah hadir sejak 1929 di kabupaten Maros, secara kuantitas tidaklah besar, yang membedakan adalah konsolidasi organisasi yang berjalan dengan ritme yang baik. Peran Ortom-ortom berjalan dan memperlihatkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang membuat kekuatan persyarikatan sangat diperhi-

tungkan secara politik. Kemampuan organisasi dalam mengonsolidasi kekuatan secara rapi dan mengoptimalkan modalitas jaringan menjadi faktor pembeda antar Muhammadiyah dengan organisasi berbasis massa Islam yang lain.

Pada kontestasi Pemilukada Maros 2010 yang dilakukan pada 1 Juli 2010 oleh KPUD Maros. Pasangan Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita) 66.138 suara (38,62%) sebagai pemenang dengan perolehan suara sekitar 37%. Dan berdasarkan perhitungan manual di tingkat TPS memang terlihat pasangan nomor urut 6 ini mendominasi perolehan suara mengalahkan lima kandidat yang menjadi pesaingnya yaitu Nurhasan-H.A. Karim Saleh 31.823 suara (18,58%), H.A. Syahriwijaya-A. Burhanuddin 24..347 suara (14,22%), Drs. H.A. Paharuddin-D. Khaddafi 33.328 suara (19,46%), Prof. Dr. Muh Asdar, SE. M.Si-H.A. Rijal Assegaf 14.197 suara (8,29%), dan Zainal Abidin Noer-Saladin Hamat 1.430 (0,83%).

Meskipun banyak peristiwa yang dianggap telah mencederai proses demokrasi ini sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, tetapi kemenangan ini mengukir sejarah baru bagi PAN pada daerah yang selama ini menjadi basis suara Partai Golkar. Keberhasilan ketua PAN menduduki kursi Bupati Maros kemudian berlanjut pada kemenangan PAN pada Pemilu Legislatif 2014.

Peningkatan suara pemilih PAN yang sangat signifikan dari 17.442 pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 57.725 pada Pemilu Legislatif 2014, merupakan resultante dari kemampuan PAN memanfaatkan modalitas sosial, ekonomi dan politik atas ketokohan Bupati dan jejaring birokrasi kekuasaannya. Keme-

nangan PAN pada Pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh kedudukan Ketua PAN sebagai Bupati. Sebagai Bupati, ketua PAN telah melakukan beberapa hal: konsolidasi organisasi sampai di level desa, investasi politik, modal (finansial) politik, serta pergerakan birokrasi. Meskipun dituntut netral, tetapi loyalitas birokrasi di kendalikan oleh partai politik.

Secara sosial budaya, kekuatan persyarikatan Muhammadiyah tidaklah dominan, tetapi berbeda secara sosial politik, sudah mulai tampak pada posisi dominan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin banyaknya kader persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki posisi-posisi strategis dalam jejaring birokrasi dan lembaga politik lokal. Posisi ini banyak digunakan untuk tujuan *policy seeking* organisasi. Kekuatan kader dalam kekuasaan politik dan birokrasi di Kabupaten Maros, seperti pada Tabel 2 dan 3 berikut ini:

Tabel 2. Kader Persyarikatan Muhammadiyah
Dalam Kekuasaan Politik dan Birokrasi di Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan di Pemerintahan	Periode	Jabatan di Muham-madiyah	Periode
1	Ir. HM. HattaRahman, MM	Bupati Maros	2010-2015	Kader	
2	A. Chaidir Syam, S.IP	Wakil Ketua DPRD (Partai PAN)	2010-2014	Ketua PDPM	2010-2015
		Ketua DPRD (PAN)	2014-2019		
3	Ir. Amri Yusuf	Anggota DPRD (PAN)	2005-2010	Kader	
		Anggota DPRD (PAN)	2010-2014	Kader	
		Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
4	Ir. Khaeriah Rahman	Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
5	Ir. Hikram Rahi,	Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
6	Drs. M. Arsyad	Anggota DPRD (PDIP)	2014-2019	Kader	
7	Dr. H. Nasiruddin Rasyid, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	2010-2013	Ketua PDM	2010-sekarang
		PltKepala Dinas Pendidikan	Desember 2013-Januari 2014	Ketua PDM	2010-sekarang
		Kabag Bina Mental Spiritual & Pemberdayaan Umat	Januari-Desember 2014	Ketua PDM	2010-sekarang
		Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi & Keuangan	Januari 2015-sekarang	Ketua PDM	2010-sekarang
8	Drs. H. Rahmat Burhanuddin, M.Si	Kadin Pariwisata &Kebudayaan	2007-sekarang	Kader	
9	Ir. H. Ansyahrullah, M.Si	Kadin Peternakan &Perikanan	2010-sekarang	Kader	
10	Drs. Abd. Baddar	Direktur PDAM	2010-sekarang	Wakil Ketua PDM Kab.Maros	2010-sekarang
11	Drs. H. Ashar Salam	Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-sekarang
12	Drs. Amran Arsyad, M.Si	Kabid PNPTK Dinas Pendidikan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
13	Ir. Suardi Halid, M.Si	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
14	Norman Salam, SKm, M.Kes	Kabid Dinas Kesehatan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
15	Drs. H. Muh. Saing, MM	Pengawas Dinas Pendidikan	2012-sekarang	WakilKetua PDM	2010-sekarang

Sumber : Hasil wawancara dengan Nasiruddin Rasyid (Jum'at, 6 Maret 2015)

Tabel 3. Kader Persyarikatan Muhammadiyah Dalam Kekuasaan Politik dan Birokrasi di Sleman

No	Nama	Jabatan di Pemerintahan	Periode	Jabatan di Muhammadiyah	Periode
1	Drs. Sri Poernomo	Wakil Bupati Sleman BupatiSleman	2005-2010 2010-2015	Wakil Ketua	2004-skr
2	Arif Haryoo	Kadinas Dikpora	2010-2014	Pengurus	2010-2015
			2014-2019		
3	Samsul Bahri	Camat Kalasan	2014-2019	Kader	
4	Mustain Aminun	Camat Moyudan	2014-2019	Kader	
5	Joko Hastaryo	Dirut RSUD	2014-skrg	Kader	
6	Priyo Handoyo	Camat Gamping	2014-2019	Pengurus	2010-2015
7	Arifin MLow	Sekcam Godean	2014-2019	Pengurus PDM	2010-2015
8	Heru Saptono	Sekt BPBD	2014-2019	Pengurus	2010-2015
9	Bowo Krisnandito	Kasi Dikpora	2014-2019	Pengurus	2010-2019
10	Aswino	Komisioner KPUD	2014-2019	Pengurus PDPM	2012-2015
11	Arif Mahfudz	Ketua KUA	Sekarang	Sekretaris PDM	2011-2016

Untuk Kab. Sleman, sebenarnya masih sangat banyak pengurus atau kader Muhammadiyah yang menjabat di lembaga birokrasi pemerintahan misalnya di KUA tetapi tidak semua kita sajikan di sini. Data-data tersebut dalam dua tabel di atas adalah bukti empirik bahwa Muhammadiyah mempunyai banyak urusan dengan pemerintahan lokal. Politik akomodasi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih atas dukungan Muhammadiyah adalah suatu keniscayaan. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi semua ormas yang melakukan memobilisasi dukungan dan menang tentu juga akan mendapatkan 'apresiasi' yang setara. Karena jarak politik yang dekat, semua memungkinkan dan begitu juga kontrol akan lebih mudah dilakukan oleh publik atas nama perseorangan maupun kelembagaan.

Sementara itu, dinamika yang sama terjadi di Kabupaten Maros Ir. HM. Hatta Rahman, M.Si sebagai Kader Muhammadiyah terhadap Pemerintahan di Kab.Maros. Hari lembaran yang sering menjadi perdebatan, pada awal periode tahun 2010 sampai dengan 2014, Bupati Maros melaksanakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha di tempat dan di waktu yang telah disepakati oleh PDM Kabupaten Maros. Pada 2014 Bupati Maros mengeluarkan Surat Edaran yang berisi bahwa Pemerintah Kab. Maros akan melaksanakan hari raya Idul Fitri yang sesuai dengan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditempatkan di lapangan Pemda Kab. Maros dan ikut bergabung pada hari raya tersebut antara lain semua pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya kepala kementerian agama serta Ketua Majelis Ulama Indonesia yang keduanya memimpin takbiran, serta pada 2014 tersebut kepala bagian mental spiritual yang menangani

adalah Ketua PDM Kab. Maros. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang sulit diambil di daerah yang dikenal bukan basis Muhammadiyah. Selain itu pula Kabupaten Maros menyusun Peraturan Daerah keagamaan yang sejalan dengan Muhammadiyah yaitu: a) Perda tentang Penyelenggaraan Haji; b) Perda tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Kesimpulan

Sebagaimana juga dari sejarah politik Indonesia, sebelum era demokratisasi, warga Muhammadiyah aktif di berbagai partai politik. Pada saat yang sama Muhammadiyah sebagai organisasi juga mendorong warganya untuk memilih dalam pemilihan umum, dengan kapasitas mobilisasi terbatas. Logika kelembagaan ini memiliki tujuan untuk tidak memecah organisasi ke dalam sekat-sekat politik (Nashir, 2010; Jung, 2014). Namun, yang menarik dalam era liberalisasi justru logika kelembagaan ini menampakkan fakta yang berbeda di tingkat lokal. Secara organisasi, Muhammadiyah secara formal memainkan peran aktif politik elektoral dalam pemilihan kepala daerah.

Tumbangnya Soeharto pada 1998 setelah tiga dekade berkuasa merupakan babak baru kebangkitan organisasi Islam untuk ambil bagian dalam proses pembangunan politik atau apa yang disebut oleh Amin Rais (2002) sebagai upaya membangun 'demokrasi inklusif'. Upaya ini mensyaratkan pembenahan kelembagaan politik — partai politik dan elitenya (Cipto 2002, Imawan, 2004). Artinya, Muhammadiyah sebagai entitas *civil society* wajar apabila mengambil bagian dari proses politik baik di level lokal maupun nasional. Politik lokal atau desentralisasi

demokrasi sendiri menghendaki peran masyarakat lebih luas dan semakin mengecilnya dominasi partai politik (Sulistiyanto, 2006; Kawamura, 2013). Dan ini membenarkan tesis Nakamura (1983) bahwa Muhammadiyah adalah pergerakan yang bermuka banyak.

Dari penjelasan panjang di atas, setidaknya kasus Muhammadiyah di Sleman dan Maros ini memberikan kesimpulan bahwa perilaku politik elektoral elite Muhammadiyah dapat dijelaskan dari tiga jenis motif. *Pertama*, ditemukan argumen yang kuat mengarah kepada kecenderungan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam politik lokal adalah untuk menjaga "identitas" paham keagamaan sekaligus nilai-nilai lokalitas (*local wisdom*) yang diyakininya. Muhammadiyah menggunakan politik elektoral sebagai sarana untuk tujuan agama dan integritas dalam pengikutnya. Muhammadiyah mampu memprioritaskan identitas sosial dan religiusnya di atas identitas politik walaupun anggotanya berusaha membawa organisasi ke ranah politik (Jung, 2014). Selain itu, obsesi dakwah di ruang publik tentu juga menjadi landasan ideologis yang sangat perlu karena ini yang dianggap dakwah yang bersifat pembaruan (*tajdid* dalam bidang politik).

Kedua, apa yang terjadi pada Muhammadiyah di kedua kabupaten ini adalah fenomena elite untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal (*office seeking*). Tentu ini bukan dalam konotasi negatif karena Muhammadiyah sebagai organisasi *civil society*, peran *high-politics* atau politik alokatif Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai wadah 'produsen' pemimpin yang tangguh. Pragmatisme politik sebagai salah satu jalan

yang dipilih sebagian elite Muhammadiyah menjadi menarik untuk dikontekstualisasikan pada peluang demokratisasi dan desentralisasi di aras lokal. Pengalaman-pengalaman di daerah yang berjuang memadukan *high-politics* dan *low-politics* atau politik alokatif dan politik konstitutif dalam merebut ruang kekuasaan (*office seeking*) dan ruang kebijakan (*policy seeking*) menjadi kekuatan baru organisasi. Jarak politik menjadi penjelas yang masuk akal, karena sehari-hari Muhammadiyah mempunyai urusan dengan pemerintahan di mana segala keputusan politik dapat dan perlu dinegosiasikan. Berbeda dengan level politik nasional, jarak teritorial dan jarak politik yang tidak terjangkau mengakibatkan orientasi politik menjadi kurang penting.

Sejalan dengan temuan Abram di atas, perilaku elektoral warga Muhammadiyah memang lebih dipengaruhi oleh kebijakan organisasi daripada hanya sekadar keterlibatan individu dalam politik (Bush, 2014). Dalam konteks ini maka secara organisasi, perilaku politik organisasi Muhammadiyah dalam pemilihan umum di tingkat lokal seperti PDM Sleman yang mendukung calon kepala Daerah dan juga dukungan kelembagaan terhadap keputusan "konvensi" internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan Afnan Hadikoesumo sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mendekati motif sebagai*office-seeking*. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, tidak ada pilihan lain bahwa proses desentralisasi kekuasaan semakin nyata, di mana kepala daerah memiliki otoritas kekuasaan yang jauh lebih besar daripada pemerintah pusat, maka Muhammadiyah tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan diplomasi hanya di

tingkat Pimpinan Pusat (PP). Muhammadiyah harus mampu menyiapkan kader-kader di tingkat daerah (lokal) yang handal untuk berkomunikasi dan berdialog secara langsung dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini bisa dilakukan dengan konsolidasi organisasi dan pemanfaatan modalitas jaringan kader pada berbagai tingkatan.

Terakhir, perilaku elite Muhammadiyah ini dapat dilihat sebagai mobilisasi sentimen 'aliran/agama/ideologi' untuk membangun nilai tawar kepada kekuatan politik/agama di luarnya dan untuk mengonsolidasikan 'keyakinan' pada jamaahnya. Situasi ini muncul pada beragam pertemuan yang memperlihatkan bahwa Muhammadiyah harus diperhitungkan dalam kancah politik dengan beragam legitimasi ideologis. Sentimen atau gengsi ini mendapatkan pijakannya juga, ketika Muhammadiyah secara material tidak banyak mendapatkan keuntungan setelah pesta pemilukada usai. Pemilu selesai, Muhammadiyah kembali mengurus dirinya sendiri, amal usaha dan dinamika internalnya sendiri.Sedikit menggubah kalimat Nakamura, politik hanyalah merupakan perhatian sampingan bagi kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah.•

Daftar Pustaka

Ali, Marpuji.(2010) "Reposisi Politik Alokatif Dalam Kancah Kenegaraan", Makalah Seminar Nasional "Mencari Format Ideal Relasi Muhammadiyah dan Politik", Universitas Muhammadiyah Makassar, 24 Agustus 2010.

Aspinal, Edward. 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta:

PolGov.

Buehler, M. (2007). Local elite reconfiguration in post-New Order Indonesia: the 2005 election of district government heads in South Sulawesi. *Review of Indonesian and Malaysian affairs*, *41*(1), 119-47.

Choi, N. (2005). *Local elections and democracy in Indonesia: the case of the Riau Archipelago.*

Cipto, Bambang (2002), 'Perilaku Elit Politik' dalam Geoff Foster (ed), Indonesia Pasca Soeharto. Yogyakarta: Tajidu Press, hlm.173-184.

Syamsuddin, Dien. "Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru" dalam Din Syamsuddin (ed.). *Muhammadiyah Kini dan Esok* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).

Efendi, David. 2014. Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam pemilu Presiden 2009. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Efendi, David dkk. 2004. Peran Civil Society Organization dalam Pilkada di Bantul 2004 (studi tentang peran PD Muhammadiyah Kab. Bantul dan PC NU Bantul). Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.

Ghazali, Abd Rahim dan Daulay, SP. 2005. Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif. Jakarta: Maarif Institute.

Jurdi, Syarfuddin. (2010). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karakoç, E., & Başkan, B. (2012). Religion in Politics How Does Inequality Affect Public Secularization? Comparative Political Studies, 45(12), 1510-1541.

Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi,"Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIV, No 2, April 2001, 25-34.

Grzymala-Busse, A. (2012). Why comparative politics should take religion (more) seriously. Annual Review of Political Science, 15, 421-442.

Jung, E. (2014). Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah. South East Asia Research, 22(1), 73-86.

Ma'arif, Ahmad Syafii "Muhammadiyah dan High Politics" Jurnal *Ulumul Quran* No. 2/Vol.VI/1995.

Mahadi, Helmi (2011), Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1 Februari.

Nakamura, Mitsuo. 1983. Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rais, Amien (2002), 'Islam dan Politik dalam Indonesia Kontemporer' dalam Geoff Foster (ed), Indonesia Pasca Soeharto. Yogyakarta: Tajidu Press, hlm. 360-368

Sulistiyanto, P. 2006. Muhammadiyah, Local Politics and Local identity in Kotagede. Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol.21, No.2, Oktober 2006.

Tanjung, Masda (2012). Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul 2009-2012: Perspektif Politik Islam (Disertasi), Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Putnam, Robert. D (2001), "Studi Perbandingan Elite Politik" dalam Mochtar Mas'oed dan Andrew dalam buku *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, hlm. 76-94.

Wibowo, Sugeng (2008), Penguatan Peran Civil Society dalam

Politik Lokal: Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo, Fenomena, Vol. 5, No. 2, Juli.

Warner, Carolyn (2000), Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in Europe, Princeton University Press, Princeton, NJ.

Wardana, Amika (2014), Political Islam beyond Islamic Political Parties: The Case of Muhammadiyah in Yogyakarta, The paper is presented at Discussion Forum Networking Event UK/CHEVENING ALUMNI of Indonesia & Timor Leste, placed in Pub Med, Melia Purosani Hotel, Yogyakarta.•